

PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH SEPATAN KABUPATEN TANGERANG

Danang Aji Kurniawan¹, Ahmad
Zaenal Santoso²

¹Teknik Sipil, Universitas Serang Raya

²Teknik Industri, Universitas Serang Raya

Riwayat Artikel

Penyerahan: 22 November 2020

Revisi: 25 November 2020

Diterima: 28 November 2020

Email: violatashya@raharja.info



Abstrak

Pengabdian ini bertujuan memaksudkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah Sepatan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang . Sosialisasi dan pendampingan pelatihan bersama pemerintah untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah Sepatan. Mengajak warga untuk lebih peduli dan berhati-hati serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di daerah Sepatan. Memberikan saran atau masukan kepada pemerintah agar diperlukan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan pengelolaan sampah yang tidak berujung pada pencemaran lingkungan, agar pemerintah dapat kembali meningkatkan perannya dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini dilakukan di Sepatan dengan menggunakan metode tatap muka. mulai dari tahap persiapan, hingga tahap pelaksanaan. dan akibatnya tingkat permasalahan dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah adalah tidak adanya Perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah Sepatan, tidak ada proses pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum diangkat ke truk sampah, sehingga prosesnya sama. tidak dikelola selama keranjang sampah tiba di tempat. pengolahan akhir untuk mengurangi sampah yang diangkat ke TPA. tidak ada sumber daya manusia yang secara khusus dipekerjakan oleh Dinas dalam hal pemilahan sampah di lokasi TPA. Kurangnya partisipasi komunitas kreatif dalam menyelesaikan proses pengelolaan 3R.

Kata kunci: Manajemen, Masyarakat, Daerah Sepatan.

Abstract

This service aims to implement the waste management policy in the Sepatan area by the Tangerang Regency Environmental Agency. Socialization and training assistance with the government to understand the implementation of waste management policies in the Sepatan area. Inviting residents to care and be more careful and participate in waste management in the Sepatan area. Provide suggestions or input to the government so that appropriate steps are needed to improve waste management that does not end in environmental pollution, so that the government can again increase its role in waste management. This research was conducted in Sepatan using the face-to-face method. starting from the preparation stage, to the implementation stage. and consequently the level of problem of the Waste Management Policy Implementation is that there is no local regulation that regulates Sepatan waste management, there is no sorting process carried out by the community before being transported to the garbage truck, so the process is the same. unmanaged as long as the waste basket arrives on the spot. final processing to reduce waste transported to the landfill. There are no human resources specifically employed by the Department for sorting waste at the TPA location. Lack of creative community participation in completing the 3R management process.

Keywords: Management, Community, Sepatan Area.

1. PENDAHULUAN

Analisa Situasi Sampah merupakan masalah krusial dalam permasalahan lingkungan yang sejalan dengan jumlah penduduk sehingga terjadi peningkatan kegiatan pembangunan di suatu lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan produksi sampah meningkat. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan masih kurang. Persampahan di suatu lingkungan disebabkan oleh beberapa parameter yang saling terkait, yaitu peningkatan, proses ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk dan kegiatan fungsi kongkrit sebagai pusat produksi, perdagangan, pemerintahan dan puskesmas. Semua parameter yang terkait dengan A, menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Pencemaran lingkungan akan terjadi dalam pengelolaan sampah tanpa menggunakan metode dan teknik pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu bencana juga akan mengganggu kelestarian lingkungan, termasuk kawasan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. Pengelolaan sampah dapat merupakan kegiatan yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan yang termasuk dalam paket sampah dan penanganan sampah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat 5 [1]. Pengelolaan sampah yang terjadi selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengelolaan

sampah sesuai dengan teknik pengelolaan sampah ramah lingkungan bertujuan untuk: a. pemeliharaan fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat; dan B. menjadikan sampah sebagai sumber daya [2]. Sampah yang tidak dikelola dengan baik telah menjadi masalah nasional sehingga pengelolaannya harus dikelola secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir agar seringkali bermanfaat secara ekonomi, menyehatkan masyarakat, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 81/2012 mengamanatkan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan. Sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi dua kegiatan pokok, yaitu: a. pengurangan limbah; b. penanganan limbah. Selanjutnya Pasal 11 ayat 1 menjelaskan tiga kegiatan pokok dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah, yaitu: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan C. penggunaan kembali limbah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan wujud dari prinsip pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang disebut dengan 3R (reduce, reuse, recycle). Pasal 16 menjelaskan lima kegiatan pokok dalam menyelesaikan kegiatan penanganan sampah yang meliputi: a. penyortiran; b. koleksi; c. angkutan; d. pengolahan; dan e. pengolahan akhir sampah. Adisasmita berpendapat bahwa manajemen tidak sekedar menyelesaikan suatu kegiatan yang memasukkan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien. Ada tiga faktor yang terlibat dalam manajemen, yaitu: 1. pemanfaatan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya; 2. Proses bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, hingga pengendalian dan pengawasan; dan tiga. Adanya seni dalam karya [3]. Dalam hal ini, penyelesaian masalah persampahan membutuhkan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait. Paradigma pengelolaan sampah bahkan harus didukung konsep pengelolaan sampah yang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah karena regulator harus siap menyediakan payung masalah sampah dengan benar [11]. Kinerja suatu TPA perlu dikaji dalam rangka meningkatkan kemampuan mengatasi masalah sampah yang dikorelasikan dengan perkembangan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk di Kota Surakarta yang berarti pula pertambahan jumlah sampah di kota tersebut memerlukan penyediaan sebuah fasilitas berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memadai [14]. Kami menemukan pengelolaan sampah yang buruk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sepatan di Kabupaten Tangerang. Hal ini sering terjadi karena tidak adanya Peraturan Daerah yang dipilih tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Sepatan tidak menggunakan cara pemilahan sampah kering dan basah dimana sampah diangkut dari asal timbulan sampah kemudian dibuang langsung ke TPA. Petugas yang hanya melayani / mengangkut sampah untuk masyarakat yang bersedia membayar retribusi, agar yang terlayani hanya sebagian masyarakat. Sistem pengelolaan sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang masih belum merata. Sebagian besar pengelolaan sampah hanya berakhir di TPA tanpa ada proses pemilahan dari sumber pertama yang menyebabkan TPA menjadi sangat berat karena sampah akan cepat menumpuk dan membuat jumlah yang menggunakan TPA kadaluarsa sebelum jangka waktu yang ditentukan. Kemudian tidak ada TPS dan TPS 3R dan tidak ada proses 3R (Reuse, Reduce, Recycle) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di TPA. Minimnya fasilitas armada dan tempat penyimpanan sampah sementara minimal memaksa masyarakat membuang sampah di sungai dan pinggir jalan. Selain itu, sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan oleh karena itu TPA sendiri belum mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah. Laboratorium yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya air lindi di dalam TPA belum berfungsi.

Masalah Mitra

Sampah makanan dan pasar masih memiliki persentase yang sangat besar dalam komposisi sampah di Indonesia. Pola yang sama juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya seperti India, Malaysia dan Vietnam [16]. Berdasarkan data dari Deputi Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) tahun 2008, setiap individu rata-rata menghasilkan 0,8 kg sampah dalam satu hari dimana 15% nya adalah plastik. Jika jumlah penduduk Indonesia diasumsikan sekitar 220 juta jiwa, maka sampah plastik yang tertimbun mencapai 26.500 ton/hari. Adapun jumlah timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 176.000 ton/hari [12]. Berdasarkan analisis hal-hal di atas, maka akan diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut ini: 1. Belum berkembangnya pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sampah dalam upaya mengurangi beban di TPA. 2. tidak ada proses pemilahan dari awal timbulan sampah sampai ke TPA. 3. Tidak adanya TPS / TPS 3R (reuse, reduce, recycle). 4. Tidak menggunakan metode 3R (reuse, reduce, recycle) dalam hal pengelolaan sampah. 5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 6. Belum ada peraturan khusus (perda) tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang.

SOLUSI DAN SASARAN LUAR RUANGAN

Sampah dapat didefinisikan sebagai beban atau sumber daya yang bernilai tergantung dari cara bagaimana sampah dikelola. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 [1] sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat [19]. Mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang kurang berguna dan bernilai, atau sisa-sisa yang tidak berguna. Sampah adalah produk dari aktivitas manusia. Secara fisik terdiri atas material yang sama dengan barang yang berguna, hanya dibedakan dari kurangnya nilai. Sebab kurangnya nilai atau kegunaan dapat dihubungkan dengan tercampurnya sampah dan komposisi sampah yang tidak diketahui. [10]

1. Penafsiran implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.
2. Bantuan sosialisasi dan pelatihan bersama pemerintah untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA.
3. Mengajak warga untuk lebih waspada dan cermat dalam berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di TPA.

4. Memberikan saran atau masukan kepada pemerintah agar diperlukan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan pengelolaan sampah yang tidak berujung pada pencemaran lingkungan, agar pemerintah dapat kembali meningkatkan perannya dalam pengelolaan sampah.
5. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel [13].
6. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) [13].

LITERATURE REVIEW

Dalam konteks pengelolaan lingkungan — sebagai teori terbanyak selama ini studi- konsisten dengan Shrivastava, ada dua kategori manajemen: (1) pengelolaan tradisional dan (2) pengelolaan ekosentris. Dalam organisasinya, manajemen tradisional sangat hierarkis secara struktural, diputuskan dari atas, nya otoritas terpusat dan dengan pendapatan berbeda di masyarakat. Sedangkan di pengelolaan ekosentris, tidak terlalu struktural secara hierarkis, keputusan diambil selama cara partisipatif, dengan kewenangan desentralisasi dan pendapatan masyarakat rendah. [9]

2.METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Kegiatan Kami memilih melakukan pengabdian kepada masyarakat di TPA setempat karena lokasi tersebut masih memerlukan pengembangan, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1. Arahan dari Camat / Dinas terkait 2. Menyiapkan dokumen terkait dengan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan sampah bertujuan untuk membentuk sampah yang memiliki nilai atau mengubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. 1. Pisahkan Sampah sesuai Jenis umumnya, sampah dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Siapkan dua tempat sampah berbeda yang didedikasikan untuk setiap jenis sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam. Seperti sisa makanan atau daun. Dengan kata lain, semua sampah yang mudah terurai adalah sampah organik. Sedangkan plastik, karet, gelas dan kaleng dikategorikan sebagai sampah anorganik. 2. Pengelolaan Sampah Organik Cara paling sederhana dalam mengelola sampah organik adalah dengan mengolahnya menjadi kompos yang akan digunakan untuk berkebun. 3. Pengelolaan Sampah Anorganik Sejumlah sampah anorganik yang sering didaur ulang, seperti kertas, karton, botol kaca, botol plastik, kaleng dsb. 4. Salah satu kebijakan sampah menjelaskan tentang pengelolaan sampah adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah [15].

3.PEMBAHASAN

Gambaran Umum Ilmu dan Teknologi Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan salah satu studi tentang Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh para ahli dan ilmuwan Administrasi publik. berikut ini adalah sejumlah gagasan penting tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. konsisten dengan Dye, "Kebijakan publik adalah apa pun yang disukai atau tidak dilakukan oleh pemerintah". Dye memiliki pendapat sederhana bahwa kebijakan publik terlepas dari apa yang pemerintah pilih untuk coba lakukan atau tidak [7]. Kebijakan yang diambil menjadi tidak berarti jika tidak ada unsur paksaan pada pelaksana atau pengguna kebijakan agar sering ditaati untuk diimplementasikan. Hal ini sering sejalan dengan pendapat Easton yang mendefinisikan kebijakan sebagai "alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat". Artinya kebijakan tersebut mengandung nilai koersif yang secara hukum akan dikelola oleh pemerintah sebagai orang yang penting bagi masyarakat [5]. Sampah tekstil yang banyak dijumpai di tempat pembuangan adalah yang tidak layak didaur ulang lagi. Tekstil di sumber memiliki kadar air yang kecil, namun bahan ini sangat baik dalam menyerap air, sehingga kebanyakan tekstil yang masuk ke TPA sudah dalam keadaan basah. Kadar volatil yang tinggi, yaitu > 96 %, menjadikan nilai kalornya tinggi juga. HHV tekstil berkisar antara 4200-4800 kkal/kg kering dan LHV juga masih berkisar antara 4000-4600 kkal/kg. Sampah tekstil, yang biasanya berada dalam jumlah yang banyak, sangat berpotensi untuk dijadikan dibakar pada insinerator atau dijadikan pellet RDF. Karet memiliki karakteristik yang berbeda. Kadar volatilnya rendah, dan kadar abunya pun tergolong tinggi (39%), namun karet memiliki nilai kalor yang besar > 5000 kkal/kg [17]. Tingginya nilai kalor dari karet menjadikannya sangat berpotensi untuk dijadikan RDF, namun perlu perhatian terhadap terbentuknya hidrokarbon, partikel karbon, oksida sulfur dan nitrogen yang timbul saat pembakaran [18]. Secara umum terdapat lima aspek penting dalam pengelolaan sampah yaitu teknologi, institusi, hukum/peraturan, pembiayaan dan partisipasi masyarakat [20].

Klasifikasi Sumber Sampah

Pada dasarnya, klasifikasi kategori sumber sampah juga dapat menggambarkan klasifikasi tingkat ekonomi yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi sampah dan menentukan pola subsidi silang. Kawasan perumahan (rumah tangga) Sumber sampah dalam kawasan perumahan dibagi menjadi: - Perumahan masyarakat berpenghasilan tinggi - Perumahan masyarakat berpenghasilan menengah - Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah / kumuh (berpenghasilan rendah / kawasan kumuh). Area Komersial Area komersial umumnya didominasi oleh komersial, hiburan dan area lainnya. Area komersial meliputi pasar, toko, restoran, bioskop, salon kecantikan, industri, dsb.

Penanganan limbah

Semua aktivitas yang dilakukan untuk mempengaruhi limbah dari kejadiannya hingga pembuangan akhir secara umum, aktivitas pengelolaan limbah meliputi pengendalian timbulan limbah, pengumpulan limbah, pemindahan, pengolahan, dan pembuangan akhir [8].

Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah

Aspek Teknis Operasional sering dibagi lagi menjadi 6 elemen fungsional (aspek), yaitu timbulan (timbulan sampah), penanganan yang terdiri dari pemisahan, penyimpanan, dan pengolahan di tempat (sampah diin g, parsial, penyimpanan dan pengolahan di dalam sumber), (pengumpulan), pemindahan dan pengangkutan (pemindahan dan pengangkutan), pemisahan, pemrosesan dan transformasi (sebagian pemrosesan dan transformasi), dan benar-benar berakhir (pembuangan). Penanggung jawab pengelolaan sampah dikelola oleh instansi terkait seperti Dinas Kebersihan. Pengelolaan oleh instansi terkait ini dimulai dari pengangkutan sampah hingga ke puncak sampah. Untuk sumber sampah dan sumber sampah menjadi tanggung jawab pengelola yaitu: Program 3R diprakirakan dapat mengurangi kuantitas sampah yang diberdayakan di TPS 3R atau di TPST atau TPA, sehingga mengurangi beban pengolahan sampah dalam skala kota. juga sebagai skala regional. Dalam menentukan strategi pengelolaan sampah, diperlukan informasi mengenai komposisi, laju dan laju timbulan sampah. Misal, sampah yang didominasi sampah organik mudah membutuhkan kegiatan yang membutuhkan kegiatan dan pembuangan dengan frekuensi yang lebih baik dibandingkan sampah yang terdiri dari sampah yang tidak membusuk, seperti kertas, plastik, daun dan sebagainya.

Kebijakan terkait Pengelolaan Sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang

Kebijakan pengelolaan sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Dalam pengelolaan sampah, kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, Pemerintah Daerah, juga karena peran masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara proporsional, efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa saja hikmah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sampah dalam bidang pengelolaan dan kebersihan sampah, apakah dilaksanakan sesuai dengan landasan yuridis yang digunakan yaitu dalam PP No 81 Tahun 2012 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah sendiri bertumpu pada pengelolaan dan pengelolaan sampah. tertuang dalam pasal 10 ayat 1. Pasal 11 menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi: a. Batasan Timbulan Sampah b. Pendaur ulang limbah; dan / atau c. Penggunaan kembali limbah. Dalam Pasal 16, penanganan sampah itu sendiri meliputi: a. Penyortiran; b. Koleksi; c. Angkutan; d. Pengolahan; dan e. Pengolahan limbah akhir. Bab II pasal 4 ayat 3 dalam PP No. 81/2012 mengamanatkan pemerintah kabupaten / kota merumuskan dan menetapkan kebijakan dan metode kabupaten / kota dalam pengelolaan sampah dalam hal pengurangan dan penanganan sampah tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip (1) tanggung jawab, (2) keberlanjutan, (3) manfaat, (4) keadilan, (5) kesadaran, (6) kebersamaan, (7) prinsip keselamatan, (8) keamanan, dan (9) nilai.

Pelaksanaan kegiatan

Pengabdian Masyarakat dengan judul: Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan 100% dari program yang diselenggarakan dengan bantuan dan beberapa kali tatap muka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dalam bentuk transfer iptek untuk mengurai permasalahan yang dihadapi mitra kerja mengacu pada upaya pengembangan wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan sampah di TPA. Alur pelaksanaan program PKM dimulai dari, 1) tahap persiapan, yang terdiri dari tahap-tahap selanjutnya: i. Penyusunan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan sosialisasi, ii. Berkoordinasi dengan mitra untuk melatih kesiapan kelompok iii. Menyiapkan jadwal sosialisasi sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah diprogramkan, iv. Pembagian tugas tim dalam hal memberikan materi kepada mitra sesuai dengan kompetensi, dan v. Menyiapkan materi pelatihan 2) Tahap pelaksanaan, yang terdiri dari: i. Sosialisasi pelatihan pengelolaan sampah, ii. Pembahasan terbatas tentang pemahaman wawasan dan keterampilan, dan iii. Praktek pelatihan langsung untuk mitra, iv. Memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan oleh mitra.



4.KESIMPULAN

Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang bersangkutan. Tingkat permasalahan dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah adalah tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang, tidak ada proses pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum diangkut ke truk sampah, sehingga prosesnya tidak sama. dikelola saat di dalam truk, limbah tiba di lokasi pemrosesan akhir untuk mengurangi limbah yang diangkut ke TPA. tidak ada sumber daya manusia yang secara khusus dipekerjakan oleh Dinas dalam hal pemilahan sampah di lokasi TPA. Kurangnya partisipasi komunitas kreatif dalam menyelesaikan proses pengelolaan 3R. Pelaksana di sini tidak melakukan tugasnya dalam menyelesaikan kebijakan yang ada. Kurangnya sarana dan prasarana membuat pengelolaan sampah menjadi masalah teknis yang sulit diatasi.

Tingkat Keragaman Kelompok Sasaran

Masyarakat yang majemuk membuat kebijakan pengelolaan sampah sulit diterapkan dengan baik. Perbedaan perilaku dan pemahaman masyarakat tentang sampah membuat pengelolaan sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang tidak berjalan dengan baik. Dimana sebagian besar masyarakat umumnya hanya menilai sampah sebagai sampah yang tidak perlu diperhatikan. Masyarakat juga menunjukkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentang sampah, ada yang peduli dan ada yang tidak suka masih banyak dari kita yang tidak ikut membayar iuran sampah. Kuantitas Alokasi Sumber Daya untuk Hambatan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat dan di dalam Tempat Pengolahan Akhir (TPA), kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengelolaan sampah.

5.DAFTAR PUSTAKA

- [1] UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- [2] PP No 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- [3] Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. Makassar.
- [4] Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi. Aksara: Jakarta.
- [5] Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI: Bandung.
- [6] Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [8] Kuncoro Sejati. 2009. Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta: Kanisius
- [9] Faqih, Abdul Fikri, Sudharto P. Hadi, and Hartuti Purnaweni. Model kebijakan anggaran berbasis lingkungan (green budgeting) di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diss. School of Postgraduate, 2017.
- [10] Mahyudin, Rizqi Putreri. "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan." *EnviroScientee* 10.1 (2016): 33-40.
- [11] Surjandari, Isti, Akhmad Hidayatno, and Ade Supriatna. "Model dinamis pengelolaan sampah untuk mengurangi beban penumpukan." *Jurnal Teknik Industri* 11.2 (2009): 134-147.
- [12] Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH). Statistik Persampahan Indonesia. Jakarta: KNLH, 2008.
- [13] Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.
- [14] Sukrorini, Tri, et al. "Kajian dampak timbunan sampah terhadap lingkungan di tempat pembuangan akhir (TPA) putri cempo surakarta." *J. EKOSAINS* 6.3 (2014).
- [15] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R.
- [16] Narayana, Tapan. (2009). Municipal solid waste management in India : From waste disposal to recovery of resources. *Waste Management* 29 (2009) 1163-1166.
- [17] Novita, Dian Marya, and Enri Damanhuri. "Perhitungan Nilai Kalor Berdasarkan Komposisi dan Karakteristik Sampah Perkotaan di Indonesia dalam Konsep Waste to Energy." *Jurnal Teknik Lingkungan* 16.2 (2009): 103-114.
- [18] Barton, Allan F.M. (1979). *Resource Recovery and Recycling*. John Willey & Sons. USA.
- [19] Suyoto, Bagong. 2008. *Rumah Tangga Peduli Lingkungan*. Prima Media, Jakarta.
- [20] Bebassari, Sri. 2008. *IntegratedMunicipal Solid Waste Management toward ZERO WASTE Approach*